

Perlakuan Perpajakan bagi Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Jakarta, November 2025

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Jenderal Pajak



www.pajak.go.id

Latar Belakang



Per kuartal-III 2025. BI mencatat transaksi jumlah e-commerce Indonesia mencapai 1,44 miliar (tumbuh 7,72% q-to-q) dan nilai transaksi mencapai Rp134,67 T (tumbuh 4,93% q-to-q).

(CNBCIndonesia.com, 2025)



pertumbuhan 22 persen secara tahunan. Dari total nilai sebesar itu, sumbangan e-commerce Indonesia nemberikan kontribusi senilai USD59 miliar dan membesar menjadi USD95 miliar pada 2025.

Kabar dari riset Google, Temasek, dan Bain & Company tentu menjadi penyejuk di tengah-tengah isu adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap perusahaan startup hingga perusahaan teknologi

Google, Temasek, dan Bain & Company memprediksi nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD95 miliar (setara Rp1.472 T) pada 2025 dan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara hingga tahun 2030. (komdigi.go.id, 2023)



Transaksi e-commerce Indonesia terus tumbuh 2020-2024, seiring pemerintah dukungan terhadap kemajuan industri digital, antara lain menjamin perlindungan vaitu: konsumen, menindak impor illegal, mempercepat pemerataan infrastruktur digital.

(antaranews.com, 2025)



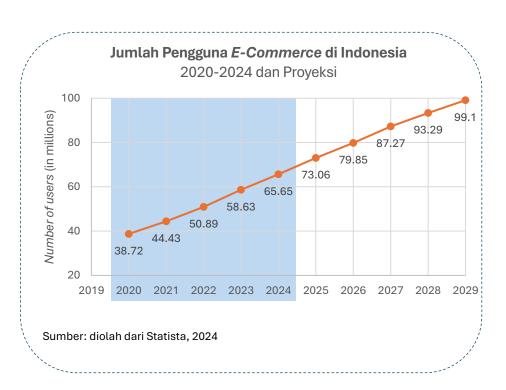
Merchandise Value (GMV) Gross Indonesia akan mencapai USD85 M -USD120 M (sekitar Rp1,800 T) pada tahun 2025. (Liputan6.com, 2025)

Latar Belakang

E-Commerce di Indonesia mengalami **pertumbuhan yang signifikan**, terutama pasca Pandemi COVID-19.



Gross Merchandise Value (GMV) menunjukkan nilai barang yang dijual melalui pasar consumer-to-consumer (C2C) di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019.



Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020 s.d. 2023, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2029.

Dasar Hukum Penunjukan Pihak Lain

Pasal 32A ayat (1) UU KUP

Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32A ayat (2) UU KUP:

Pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.

Pasal 44E ayat (2) huruf f UU KUP

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan**.



Penanganan Pelaku Usaha Ekonomi Digital

Klaster	Regulasi	Pokok Pengaturan
PPN PMSE	PMK-81/2024	 Subjek: Pemanfaat Barang/ Pemanfaat Jasa Objek: Pemanfaatan BKP tidak berwujud (termasuk Barang Digital) dan JKP (termasuk Jasa Digital) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE (B2B dan B2C) Tarif: 12% x (11/12)
Pajak Fintech (P2P <i>Lending</i>)	PMK-69/2022	 a. PPh: 15% bagi WPDN/BUT & 20%/P3B bagi WPLN non-BUT, dikenakan atas penghasilan bunga yang diterima oleh <i>lender</i> b. PPN: 12% x (11/12) bagi Pengguna jasa Fintech (<i>lender, borrower, e-wallet user</i>), dikenakan atas jasa penyelenggaraan Fintech
Pajak Kripto	PMK-50/2025	 a. Perdagangan aset kripto: PPh final 0,21% (PPMSE DN); 1% (PPMSE LN) Pembeli tidak dikenai PPN b. Jasa penyediaan sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi aset kripto: PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh) PPN tarif 12% x (11/12) c. Jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang (miner): PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh) PPN Besaran Tertentu 2,2%
Pajak SIPP	PMK-58/2022	 a. PPh: 0,5% bagi WP rekanan atas penghasilan dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan persewaan yang dilakukan melalui SIPP b. PPN: 12% x (11/12) bagi instansi pemerintah (satker) sebagai pembeli, dikenakan atas penyerahan BKP/JKP oleh rekanan melaui SIPP

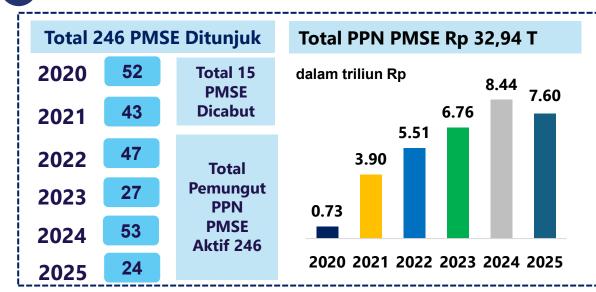
Penanganan Pelaku Usaha Ekonomi Digital

Realisasi Penerimaan Pajak Ekonomi Digital (per 30 Sept 2025)





PPN PMSE – PMK 81 Tahun 2024



Pajak Kripto - PMK 50 Tahun 2025

Total Penerimaan Rp 1,7 T	37 Exchanger Aset Kripto sebagai pemungut pajak kripto hingga Sept 2025			
	2022	2023	2024	2025
411122-405-PPh Pasal 22	117,44 M	103,30 M	289,82 M	50,05 M
411219-900-PPN	129,01 M	117,53 M	330,58 M	65,05 M
*) 411122-100-PPh Pasal 22	-	-	-	275,75 M
*) 411211-111-PPN	-	-	-	230,45 M
Total	246,45 M	220,83 M	620,39 M	621,30 M
*) setelah neruhahan MAP KIS nada sistem <i>Coretay</i> DIP				

Pajak Fintech (P2P Lending) - PMK 69/PMK.03/2022

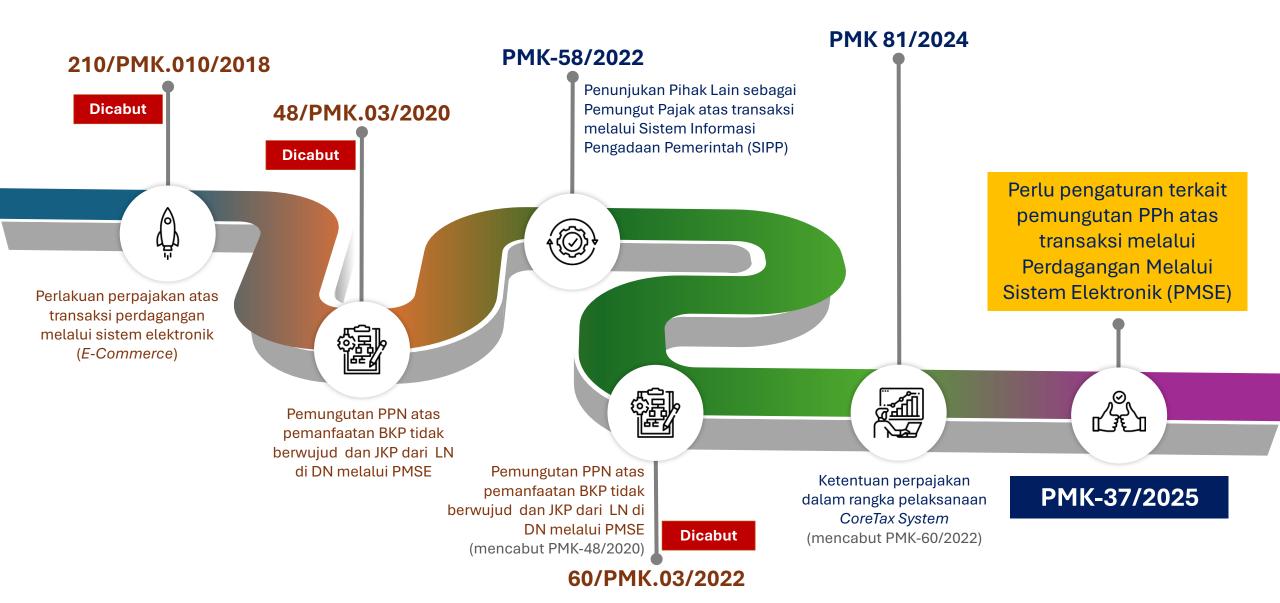
Total Penerimaan Rp 4,097 T	96 Platform <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> sebagai pemungut pajak Fintech P2PL hingga Sept 2025			
	2022	2023	2024	2025
411124-105-PPh Pasal 23	121,84 M	331,64 M	363,37 M	22,34 M
411127-107-PPh Pasal 26	88,20 M	105,83 M	453,83 M	75,42 M
411211-100-PPN	236,35 M	672,11 M	661,26 M	666,51 M
*) 411124-100-PPh Pasal 23	-	-	-	297,94 M
*) 411127-100-PPh Pasal 26	-	-	-	1,12 M
Total	446,40 M	1,11 T	1,48 T	1,06 T
*) setelah perubahan MAP KJS pada sistem <i>Coretax</i> DJP				

Pajak SIPP - PMK 58/PMK.03/2022

Total Penerimaan Rp 3,78 T	2022	2023	2024	2025
411122-101-PPh Pasal 22	27,5 M	77,5 M	86,7 M	8,5 M
411219-900-PPN	374,9 M	1.038,0 M	1.242,3 M	86,77 M
*) 411122-100-PPh Pasal 22	-	-	-	50,93 M
*) 411211-111-PPN	-	-	-	784,92 M
Total	402,4 M	1.116,5 M	1.329,0 M	931,12 M

- **Untuk Tahun 2022-2024** menggunakan populasi Wajib Pajak yang melakukan penyetoran MAP KJS 411122-101
- Untuk Tahun 2025 menggunakan populasi Wajib Pajak SIPP yang telah melakukan Integrasi Data Host to Host dengan DJP
- *) setelah perubahan MAP KJS pada sistem Coretax DJP

Respon DJP terhadap Perkembangan *E-Commerce*



Marketplace sebagai Pemungut PPh (PMK-37/2025)





Pihak Lain (*marketplace*) ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Tujuan

Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak

Memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan (level playing field) antara bisnis online dan offline

Memberikan **kemudahan dan kesederhanaan**administrasi guna
meningkatkan kepatuhan

Skema Pemungutan PPh

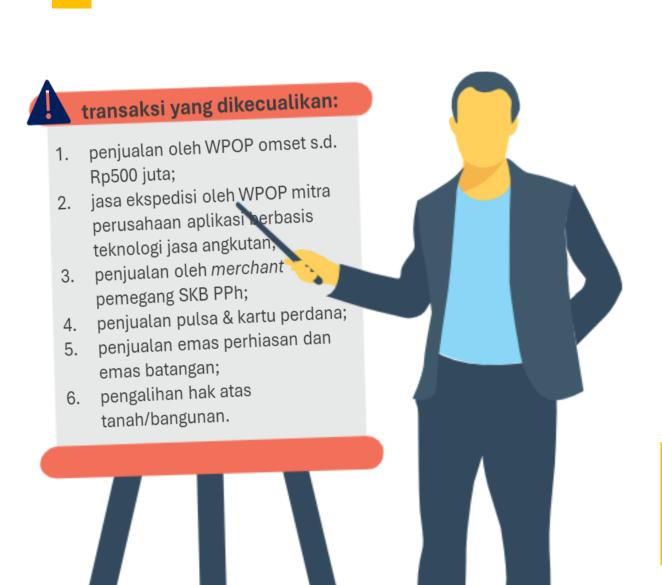
PPh Pasal 22 0,5%

dari Peredaran Bruto

yang diterima/diperoleh Pedagang Dalam Negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM

Jenis WP (<i>merchant</i>)	Omset	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang Dipungut	Perlakuan atas PPh yang Dipungut	
	≤500 Juta	tidak dipungut	-	-	
			final (memenuhi PP55/2022)	final	
Orang Pribadi	>500 juta s.d 4,8 miliar	0,5%	tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum)	PP55/2022 atau memilih	
	> 4,8 M	0,5%	tidak final		
			final (memenuhi PP55/2022)	final	
Badan	s.d 4,8 miliar	0,5%	tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 atau memilih ketentuan umum)	kredit pajak dalam SPT Tahunan	
	> 4,8 miliar	0,5%	tidak final		

Poin Penting



PPh Pasal 22 PMSE BUKAN jenis PAJAK

Peranan
0,5%
mengikuti
nature
merchant

Yang dipungut PPh atas penghasilan merchant -> TIDAK MENAMBAH HARGA

Administrasi yang mudah Menciptakan
KONDISI yang
SETARA antara
pelaku usaha
konvensional
dan digital





Terima Kasih

Pajak, Semua dapat Manfaatnya







1 500 200

